



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG RETNO SRI SUBIYANDANI**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **152675**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.640.000.000

1. Tanah Seluas 884 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 1989 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/162 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 300.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.000.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 44.721.421

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.020.721.421



III. HUTANG

Rp. 100.522.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.920.199.421

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.